

ABSTRAK

Rendy Kurniawan Sutikno (01656170045)

“PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PIHAK KETIGA/KREDITUR ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG”.

(xii + 119 halaman)

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 merubah konsep pembuatan perjanjian perkawinan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, sehingga permasalahan yang timbul kemudian adalah terkait keabsahan daripada perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan sebelum dan sesudah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 dan perlindungan kepentingan bagi pihak ketiga selaku kreditur dengan adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan penetapan pengadilan sebelum dan sesudah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai perlindungan kepentingan bagi pihak ketiga selaku kreditur. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak memerlukan suatu penetapan pengadilan dikarenakan undang-undang perkawinan tidak mempersyaratkannya. Dikarenakan perjanjian perkawinan seringkali dibuat atas dasar itikad tidak baik, maka untuk setiap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung wajib dicatatkan atau didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang menerbitkan akta perkawinan guna memenuhi asas publisitas. Selain pencatatan perjanjian perkawinan, dalam hukum dikenal pula adanya asas *Actio Pauliana* yang memberikan perlindungan atas segala tindakan debitur yang dapat merugikan kepentingan pihak ketiga selaku kreditur.

Kata Kunci : Perlindungan Kepentingan Pihak Ketiga, Kepentingan Kreditur, Perjanjian Perkawinan.

Referensi : 55 (1974 - 2020)

ABSTRACT

Rendy Kurniawan Sutikno (01656170045)

“THE THIRD PARTY'S INTEREST PROTECTION FOR MARRIAGE CONTRACT MADE AFTER MARRIAGE”.

(xii + 119 pages)

The existence of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XIII/2015 changes the concept of making a marriage contract that originally could only be made before or when the marriage took place changed to be made after the marriage took place, so that the problems that arise later are related to the validity of the marriage contract made based on the court's decision before and after the issuance of the Constitutional Court Decree Number 69/PUU/XIII/2015 and the third party's interest protection as creditors with a marriage contract made after the marriage takes place. The purpose of this paper is to explain and provide an overview of the validity of the marriage contract made based on court decisions before and after the issuance of the Constitutional Court Decision and also to explain and provide an overview of the third party's interest protection as creditors. In this paper, researcher used a normative legal research method with a law approach and case approach. Based on this research, it can be concluded that a marriage contract made after marriage does not require a court decision because the marriage law does not require it. Because marriage contract are often made on the basis of bad faith, every marriage contract made after the marriage takes place must be registered by the Marriage Registrar Office where issued the marriage certificate in order to fulfill the principle of publicity. In addition to recording the marriage contract, the law also known as the principle of Actio Pauliana which provide protection against any act prejudicial to the interests of the debtor to the creditor as a third party.

Keywords : Third Party's Protection, Creditor's Interest, Marriage Contract.

Refference : 55 (1974 - 2020)